

STUDI KOMPARATIF SISTEM PENDIDIKAN DI JERMAN DAN KOREA SELATAN

Oleh: Ali Muhtadi

Abstract

Education Comparative study hases reality benefit, especially upon which consideration to improve education quality in a Negara. By see and excellences assesment system education in Other country, we can learn matters from Negara referred as and exploit it to education progress in fatherland. Country Germany (Europe) and south korea (Asia) is two countries that have quite fast progress in the world of industry and commerce. This Progress it is of course not get out ofs education system that they carry out. By assesment of education system of both Negara are referred [as] expected can be taken its benefit for the sake of quality improvement pelaksanaan our education system.

Pendahuluan

Salah satu aspek penting dalam proses kehidupan dan pengembangan diri adalah “ membanding”. Manusia, sadar atau tidak sadar, pada dasarnya selalu melakukan penilaian terhadap dirinya dengan melihat aspek kehidupan yang sama pada orang lain. Tanpa perbandingan, proses kehidupan mungkin akan berjalan lamban, atau mungkin pula hampir-hampir tidak pernah berubah ke arah yang lebih baik.

Studi perbandingan pendidikan sebagai salah satu bagian dalam bidang pendidikan memiliki manfaat nyata, terutama sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di suatu Negara. Dengan melihat dan mengkaji keunggulan-keunggulan system pendidikan di Negara lain, kita bisa belajar berbagai hal dari Negara tersebut dan memanfaatkannya demi kemajuan pendidikan di tanah

air. Untuk itulah pada kesempatan kali ini, penulis mencoba menguraikan perbandingan sistem pendidikan di Negara Jerman dan Negara Korea Selatan.

Penulis tertarik untuk melihat dan mengkaji system pendidikan di Kedua Negara ini, dikarenakan Kedua Negara ini memiliki kemajuan yang begitu pesat dalam sektor industri dan perdagangan. Kemajuan ini tentunya tidak terlepas dari kemajuan pendidikan di masing-masing Negara tersebut, terutama dalam hal penguasaan teknologi industri dan perdagangan.

Dengan keterbatasan yang dimiliki, penulis mencoba mengkaji berbagai literature yang relevan tentang system pendidikan di Kedua Negara di atas dan menyusunnya dalam bentuk makalah singkat ini, Oleh karena itu, berbagai masukan dan saran dari pembaca, untuk perbaikan makalah ini sangat penulis harapkan. Namun demikian penulis telah berusaha untuk menyajikan makalah ini semaksimal mungkin sehingga diharapkan akan dapat menambah bahan, dan kajian penulis tentang pemahaman sistem pendidikan pada kedua Negara ini. Makalah ini disajikan dalam beberapa Topik yaitu, Pendahulaun, Kajian Sistem pendidikan, Pembahasan serta Kesimpulan dan Rekomendasi, yang kesemuanya tersaji dalam kalimat yang singkat dan padat.

Kajian Komparatif Sistem Pendidikan di Negara Jerman Dan Korea Selatan

1. Sistem Pendidikan di Negara Jerman

a. Latar Belakang

Secara geografis negara Jerman terletak ditengah-tengah benua Eropa. Jerman memiliki luas wilayah 356,957 kilometer persegi, dengan besar penduduk 82 juta lebih pada tahun 1950-an, dan sekitar 8% diantaranya bukan berkebangsaan Jerman. Warga Negara asing ini yang paling banyak berasal dari Negara Turki, baik yang lahir di Jerman atau keturunan Turki. Mereka

berdatangan ke Jerman pada saat Negara-negara Eropa selatan mulai merekrut buruh-buruh pekerja tangan. Imigran lain masuk ke Jerman sebagai pengungsi, karena perang, atau karena tekanan ekonomi di negaranya masing-masing. Jenis Imigran Ketiga adalah etnis Jerman sendiri (walaupun tidak semuanya berbahasa Jerman). Berbeda dengan jenis imigran lain, mereka dapat sewaktu-waktu masuk meminta kewarganegaraannya sewaktu masuk ke Negara Jerman.

Bahasa yang dominant di Negara Jerman adalah bahasa Jerman sendiri dengan bervariasi dialek, dikarenakan, dari akar sejarah Jerman memiliki empat kelompok minoritas bahasa yaitu *Danes, Frisian, Sinti (Gypsies)*, dan *Sorb*. Kelompok ini tidak ada yang beranggotakan lebih dari 100.000 orang. Namun demikian, untuk mengajar dari kelompok anak-anak minoritas ini tetap digunakan bahasa Ibu mereka sendiri.

Jerman bukan negara yang kaya akan sumber daya alam, dan juga Negara yang mampu memenuhi produksi pertanian sendiri. Oleh karena itu Jerman banyak tergantung pada barang-barang impor dan eksportnya. Pada umumnya Perdagangan Jerman (barat) sangat baik, dan investasi Jerman di luar negeri melebihi investasi asing di dalam negeri. Sampai tahun 1990, secara resmi, tidak ada pengangguran di Jerman Barat, tetapi di Jerman timur masih tercatat 10,3%.

b. Tujuan Pendidikan Jerman

Sesuai dengan Konstitusi (Grundgesetz),⁵ Republik Federasi Jerman adalah sebuah 'republik, sebuah demokrasi, sebuah federal, secara sosial dan konstitusional adalah negara bagian yang bertanggungjawab. Dengan konstitusi pendidikan yang menjamin : 'kebebasan untuk seni dan ilmu pengetahuan, penelitian dan mengajar, kebebasan untuk percaya, menyakini (conscience) dan menyatakan suatu agama, kebebasan untuk memilih sebuah tempat tinggal dan tempat belajar atau pelatihan, persamaan hukum dan hak asasi dasar dari orang tua untuk memperhatikan dan mendidik anak-anak mereka'.

(<http://www.inca.org.uk/1418.html>)

Tujuan pendidikan di Jerman ditentukan oleh Negara bagian masing-masing, Negara federal tidak ikut campur tangan dalam urusan pendidikan secara langsung.

c. Struktur dan Jenis Pendidikan

Struktur sistem pendidikan Jerman secara formal meliputi : pendidikan dasar (*primary education*), pendidikan menengah (*lower secondary education*), dan pendidikan tinggi. Tergantung dari Negara bagian, wajib sekolah di Jerman berlaku Sembilan atau sepuluh tahun, dengan normal anak masuk sekolah pada usia enam tahun. Namun demikian, sebagian anak-anak Jerman ada yang mengikuti pendidikan pra-sekolah (*Kindergarten*) secara sukarela pada usia 3-5 tahun. Adapun sistem pendidikan Jerman dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Pendidikan dasar (*primary school*) dengan lama pendidikan umumnya 4 tahun (usia 6-9 tahun) kecuali ibu kota Negara (Berlin) melaksanakan system 6 tahun, sementara beberapa Negara bagian yang lain melaksanakan pengajaran tambahan 2 tahun pada grade 5 dan 6 dalam suatu lembaga perantara yang memberikan berbagai jenis pelajaran sebagai persiapan masuk ke program-program sekolah menengah. Negara bagian lain menyediakan bentuk yang lain pula dengan memberikan pelajaran-pelajaran khusus pada grade 5 dan 6, dan siswa dapat dengan mudah pindah dari sekolah satu ke sekolah yang lainnya sesuai dengan program yang diinginkan. Pada akhir grade 4 (atau grade 6 pada beberapa tempat), siswa diarahkan ke program-program berbeda seperti yang tersedia di sekolah menengah.

Sekolah menengah (*lower secondary education*) di Jerman dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu: ***Hauptschule/Realschule, Realschule/Mittelschule, Gymnasium*** dan ***Gesamtschule***.

Hauptschule/Realschule merupakan jenis sekolah menengah yang memberikan pengajaran yang diarahkan untuk memasuki pemagangan setelah

siswa menerima sertifikat tamat belajar. Program ini memberikan pelajaran khusus untuk mempersiapkan siswa menghadapi kariernya di masa mendatang, dan juga mengajarkan bahasa asing (biasanya bahasa Inggris). Program *houptschule* dikategorikan sebagai program yang paling ringan tuntutan akademiknya di Jerman pada grade 7 sampai 9.

Realschule merupakan program sekolah yang mempersiapkan siswa untuk memasuki karier sebagai pegawai atau buruh kelas menengah. Program ini memiliki tuntutan akademik yang lebih tinggi daripada *houptschule*. Semenjak tahun 1970-an, tamatan sekolah ini telah menjadi persyaratan untuk memasuki program-program pematangan. Sertifikat dari sekolah ini juga menjadi kunci untuk memasuki berbagai jalur pendidikan yang lebih tinggi.

Gymnasium, bertujuan untuk mempersiapkan siswa ke pendidikan tinggi, walaupun tidak semua lulusannya melanjutkan ke perguruan tinggi. Pada grade 5 sampai 10, isi kurikulum bervariasi sesuai dengan jenis sekolah yang dimasuki. Mulai grade 11, siswa dapat memilih spesialisasi dalam susunan yang agak rumit. Setelah berhasil menyelesaikan ujian pada grade 13 siswa berhak memasuki perguruan tinggi.

Gesamtschule merupakan sekolah yang menekankan program secara komprehensif bagi semua anak dalam suatu bidang, dan anak-anak akan memperoleh sertifikat yang berbeda sesuai dengan bidang yang dipilihnya. Namun karena terjadi banyak kontroversi pada program sekolah jenis ini, maka tidak semua daerah yang membuka sekolah ini (hanya dibuka di daerah dibawah *lander* yang beraliran sosial demokrat).

Selanjutnya, lembaga pendidikan tinggi di Jerman terdiri dari dua jenis, yaitu: *Pertama*, akademi / politeknik / *Fachhochschulen* yang ditempuh selama 12 tahun pendidikan lengkap); *Kedua*, Universitas. Tidak ada persyaratan program tertentu untuk memasuki universitas, dan tidak ada perbedaan yang jelas antara program sarjana dan program pascasarjana. Sertifikat *Pertama* dapat diperoleh setelah 4 atau enam tahun pelajaran.

Pada tahun 1996 Angka Pendidikan Murni (APM) murid SD adalah 86%, sedangkan angka melanjutkan ke sekolah menengah adalah 88%,

Selain pendidikan formal, di Jerman juga berkembang pendidikan non formal yang berupa pendidikan vokasional, teknik, dan bisnis yang diwajibkan bagi anak-anak yang tamat dengan ijazah pendidikan umum pada tingkat *Hauptschule* atau *Realschule* dan juga yang tidak dapat ijazah setelah tamat belajar 9 tahun. Pendidikan ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan pekerjaan, dan pelaksanaannya dapat diikuti secara paruh waktu atau purna waktu. Pendidikan non formal yang lain yaitu berupa pendidikan orang dewasa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, sesuai dengan tuntutan zaman dan perubahan ekonomi, sosial, dan politik yang sangat cepat. Program pendidikan orang dewasa dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu umum, vokasional (termasuk teknik dan keuangan) dan politik.

d. Manajemen pendidikan di Jerman

Sistem pendidikan di Jerman adalah desentralisasi, mulai dari level SD sampai dengan sekolah menengah. Beberapa *Lander* (penguasa daerah) membuat berbagai ketentuan konstitusi mereka masing-masing mengenai pengaturan masalah-masalah pendidikan, dan seluruhnya melalui proses legislative. Pengaturan ini meliputi penetapan tujuan pendidikan, struktur, isi pengajaran, dan prosedur dalam system daerah mereka masing-masing. Adapun yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan di dalam Negara bagian adalah kementerian kabinet atau Kementerian Kebudayaan (*Kultusministerium*). Pada Negara-negara bagian yang luas daerahnya, sekolah tidak dikontrol secara langsung oleh kementerian Negara bagian, tetapi melalui badan administrasi regional yang merupakan bagian dari badan eksekutif. Masyarakat setempat biasanya juga punya tanggung jawab menyediakan infra-struktur yang diperlukan dan adakalanya juga terlibat dalam pengangkatan staf.

- 1) **Biaya Pendidikan.** Alokasi biaya pendidikan sepenuhnya bersumber dari *Lander* (Daerah) dan masyarakat setempat, kecuali untuk pendidikan tinggi. Menjadi tanggung jawab pemerintah federal. Hampir semua program pendidikan di Jerman bersifat gratis (termasuk pembebasan uang kuliah di pendidikan tinggi). Pemerintah federal juga memberikan bantuan uang kepada sebagian siswa sekolah menengah dan mahasiswa perguruan tinggi. Kebanyakan sekolah-sekolah swasta yang kecil, kira-kira 90% dari biaya operasional sekolah dibantu oleh pemerintah federal. Pengeluaran pemerintah federal pada tahun 1990 untuk anggaran pendidikan mencapai total 9,3% dari GNP.
- 2) **Personalia.**

Hanya guru-guru *Gymnasium* dan sebagian guru-guru spesialis untuk bidang keuangan yang dididik di tingkat Universitas (S1), dengan tekanan utama bidang keahlian daripada bidang keguruan. Namun demikian, sejak tahun 1960, telah mulai dicanangkan persyaratan kualifikasi yang sama untuk semua guru, minimal telah dididik di Universitas. Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan metode mengajar ditempuh melalui *in-service training*.
- 3) **Kurikulum.** Kurikulum dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan sesuai Negara bagian masing-masing di bawah kendali *Lander* (pemerintah daerah). Sebagian besar *Lander* mewajibkan mata pelajaran di *primary education* sebagai berikut: German; mathematics; social studies (usually taught as *Sachunterricht*); history (usually taught as *Sachunterricht*); geography (usually taught as *Sachunterricht*); biology (aspects of biology are taught within science, which is usually taught as *Sachunterricht*); physics (aspects of physics are taught within science, which is usually taught as *Sachunterricht*); chemistry (aspects of chemistry are taught within science, which is usually taught as *Sachunterricht*); art; music; sport; religion; and modern foreign languages. Sedangkan untuk sekolah menengah, kurikulum berbeda-beda

penekannannya, sesuai jenis sekolah sebagaimana dijelaskan di depan. Namun paling tidak pada setiap jenis sekolah menengah tersebut memuat materi pelajaran sebagai berikut: German; mathematics; one foreign language (usually English); natural and social sciences; music; art; and sport.

- 4) **Sistem Ujian dan Sertifikasi.** Penilaian akhir tahun siswa di dasarkan pada hasil analisis terhadap kinerja siswa. Dari Grade 2 (primer, umur tujuh) dan seterusnya, hanya terdapat laporan setengah-tahunan meliputi komentar terhadap kemajuan dan nilai yang diperoleh dengan membandingkan kinerja mereka dengan apa ada pada selain dalam sebuah kelompok pengajaran. Terdapat satu kecenderungan ke arah pelaporan proses belajar dan kinerja, dan terhadap keikutsertaan kelas serta perilaku sosial di sekolah. Anak-anak yang nilainya dan hal lainnya tidak cukup harus (dapat memilih) untuk mengulang kembali di awal tahun baru. Tidak ada nilai ujian atau ijasah di sekolah dasar, yang ada hanya sebuah laporan kinerja siswa pada akhir tahun. Ujian nasional di selenggarakan pada grade 10 dan 12

e. Isu-isu Pendidikan Jerman

Masalah pendidikan di Jerman pada tahun 1990-an berkisar masalah reunifikasi pendidikan Jerman barat dan Jerman timur. Jerman barat dikenal dengan system pendidikannya yang sangat mementingkan kualitas (tradition quality), Jerman Timur lemah dalam hal itu. Di lain pihak Jerman Timur memiliki keunggulan, misalnya dalam system dukungan terhadap siswa-siswa yang memiliki keunggulan atau keistimewaan. Persoalan utamanya berpusat pada kebutuhan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat di Kedua Negara bagian Jerman.

2. Sistem Pendidikan Republik Korea Selatan

a. Latar Belakang

Republik Korea Selatan yang didirikan pada tahun 1948 terletak di semenanjung daratan Asia Timur, dengan batas-batas wilayah sebelah timur berbatasan dengan lautan pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan selat Jepang, disebelah barat berbatasan dengan demarkasi militer (garis lintang 38⁰) yang memisahkan Korea Selatan dan Korea Utara.

Penduduk Korea Selatan kurang lebih 47 juta jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk rata-rata 1,7% per tahun dengan kondisi penduduk yang homogen (etnik Korea), dengan angka literasi 98% (*World Almanac* 2000).

Adapun sistem pemerintahan Korea Selatan bersifat sentralistik. Dengan sistem sentralistik ini, maka kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk di bidang pendidikan dapat dijalankan tanpa harus mendapat persetujuan badan legislatif daerah, seperti yang terdapat pada pemerintahan sistem desentralisasi.

b. Tujuan Pendidikan Korea Selatan

Salah satu keputusan Dewan Nasional Republik Korea tahun 1948 adalah menyusun undang-undang pendidikan. Sehubungan dengan hal ini, maka tujuan pendidikan Korea Selatan adalah untuk menanamkan pada setiap orang rasa Identitas Nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan Nasional; (menyempurnakan kepribadian setiap warga Negara, mengemban cita-cita persaudaraan yang universal mengembangkan kemampuan untuk hidup mandiri dan berbuat untuk Negara yang demokratis dan kemakmuran seluruh umat manusia; dan menanamkan sifat patriotisme.

c. Struktur dan jenis Pendidikan

Secara umum sistem pendidikan di Korea Selatan terdiri dari empat jenjang yaitu : Sekolah dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, SLTA dan pendidikan tinggi. Keempat jenjang pendidikan ini sejalan dengan “grade” 1 - 6

(SD), grade 7 - 9 (SLTP), 10 -12 (SLTA), dan grade 13 - 16 (pendidikan tinggi/program S1) serta program pasca sarjana (S2/S3). Berikut visualisasi grade pendidikan yang dimaksud.

Sekolah dasar merupakan pendidikan wajib selama 6 tahun bagi anak usia 6 sampai 12 tahun, dengan jumlah Angka Partisipasi Murni (APM) SD mencapai 99,8%, putus sekolah SD 0%.

SMP merupakan kelanjutan SD bagi anak usia 12-15 tahun, selama 3 tahun pendidikan, yang kemudian melanjutkan ke SLTA pada grade 15-18, dengan dua pilihan yaitu: umum dan sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan meliputi pertanian, perdagangan, perikanan dan teknik. Selain itu ada sekolah komperhensif yang merupakan gabungan antara sekolah umum dan sekolah kejuruan yang merupakan bekal untuk melanjutkan ke akademik (*junior college*) atau universitas (*senior college*) yang kemudian dapat melanjutkan ke program pasca sarjana (*graduate school*) gelar master/dokter.

d. Manajemen Pendidikan Korea Selatan

Kekuasaan dan kewenangan dilimpahkan kepada menteri pendidikan. Di daerah terdapat dewan pendidikan (*board of education*). Pada setiap propinsi dan daerah khusus (Seoul dan Busan), masing-masing dewan pendidikan terdiri dari tujuh orang anggota, yang mana lima orang dipilih oleh daerah otonom dan dua orang lainnya merupakan jabatan '*ex officio*' yang dipegang oleh walikota daerah khusus atau gubernur propinsi dan *super intendent*, Dewan pendidikan diketuai oleh walikota atau gubernur.

1) **Anggaran pendidikan.** Anggaran pendidikan Korea Selatan berasal dari anggaran Negara, dengan total anggaran 18,9% dari Anggaran Negara. Pada tahun 1995 ada kebijakan wajib belajar 9 tahun, sehingga porsi anggaran terbesar diperuntukan untuk ini, adapun sumber biaya pendidikan, bersumber dari GNP untuk pendidikan, pajak pendidikan, keuangan pendidikan daerah, dunia industri khusus bagi pendidikan kejuruan.

- 2) **Guru/Personalia.** Terdapat dua jenis pendidikan guru, yaitu tingkat academic (grade 13-14) untuk guru SD, dan pendidikan guru empat tahun untuk guru sekolah menengah. Dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah untuk pendidikan guru negeri. Kemudian guru mendapat sertifikat yaitu : sertifikat guru pra sekolah, guru SD, dan guru sekolah menengah, sertifikat ini diberikan oleh kepala sekolah dengan kategori guru magang, guru biasa dua (yang telah diselesaikan *on-job training*) dan lesensi bagi guru magang dikeluarkan bagi mereka yang telah lulus ujian kualifikasi lulusan program empat tahun dalam bidang *engineering*, perikanan, perdagangan, dan pertanian. Sedangkan untuk menjadi dosen *junior college* (D2), harus berkualifikasi master (S2) dengan pengalaman dua tahun dan untuk menjadi dosen di *senior college* harus berkualifikasi doktor (S3).
- 3) **Kurikulum.** Reformasi kurikulum pendidikan di korea, dilaksanakan sejak tahun 1970-an dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik dalam kelas dan pemanfaatan teknologi, adapun yang dikerjakan oleh guru, meliputi lima langkah yaitu (1) perencanaan pengajaran, (2) Diagnosis murid (3) membimbing siswa belajar dengan berbagai program, (4) test dan menilai hasil belajar. Di sekolah tingkat menengah tidak diadakan saringan masuk, hal ini dikarenakan adanya kebijakan "*equal accessibility*" ke sekolah menengah di daerahnya.

e. Isu-isu Pendidikan Korea Selatan

Diantaranya adalah: 1) meningkatkan investasi pendidikan, 2) memperkecil jurang pemisah antara penduduk kota dan desa, 3) memberikan perhatian besar terhadap pendidikan sosial dan moral.

Komparatif Statistik-Statistik Pendidikan

Berikut ini disajikan beberapa data statistik yang ada kaitannya dengan pendidikan, Jerman, Korea Selatan, dan Indonesia, Amerika sebagai pembanding adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Perbandingan Masa Wajib Belajar dan Usia Masuk Sekolah

No	Negara	Wajib Belajar		Umur masuk
		Batas umur	Lamanya	Pra sekolah
1	Jerman	6-18 th	12 th	3 th
2	Republik Rakyat Korea Selatan	6-15 th	9 th	5 th
3	Indonesia	7-15 th	9 th	5 th
4	Amerika Serikat	6-16 th	10 th	3 th

Sumber : *Unesco Statistical Yearbook 1999*.

Tabel 2

Perbandingan Persentase Penduduk yang Mampu Tulis Baca (Literasi)

No	Negara	%	Th
1	Jerman	100	1993
2	Republik Rakyat Korea Selatan	98	1994
3	Indonesia	84	1997
4	Amerika Serikat	97	1994

Sumber: *The World Almanac and Book of Facts 2000*

Tabel 3

Perbandingan APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni)
Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah

Tahun	Negara	APK		APM	
		SD	SLTP/A	SD	SLTP/A
1996	Jerman	104	104	86	88
1995	Korea Selatan	94	102	92	97
1998	Indonesia	110,83	70,43	98,28	45
1995	Amerika Serikat	102	97	95	90

Sumber: UNESCO *Year book* 1999, (gabungan antara pria dan wanita)

Tabel 5

Presentase Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan
Dihitung dari GNP dari Total Anggaran Pemerintah

No	Negara	% dari GNP		% Total Belanja Pemerintah	
		1990	1995	1990	1995
1	JERMAN	5,4	4,8	-	8,4
2	KORSEL	3,5	3,7	15,5	17,5
3	INDONESIA	1,1	1,4	5,22	7,8
4	AS	5,2	5,4	12,3	14,4

Sumber: UNESCO *Year book* 1999

Pembahasan

Berdasarkan kajian singkat tentang studi perbandingan sistem pendidikan di negara Jerman dan Korea Selatan, seperti yang sudah penulis uraikan pada bab II, selanjutnya penulis mencoba memberikan beberapa refleksi sebagai bahan perbandingan dengan system pendidikan Indonesia yang saat ini sedang mengalami perubahan drastis dalam segi manajemennya.

Penulis tertarik untuk membahas kedua Negara ini, karena penulis beranggapan bahwa kedua Negara ini merupakan Negara “**maju**” dikawasan Asia, dan di kawasan Eropa. Negara Korea Selatan sebagai negara berkembang pada akhir-akhir ini mulai bangkit dan menunjukkan kemampuannya untuk berkompetitif dalam pasaran otomotif dan industri elektronik dunia umumnya di kawasan Asia dan pasaran Indonesia khususnya. Sementara negara Jerman pada tahun 1990 mulai bangkit untuk membangun pendidikannya melalui reunifikasi dalam bidang pendidikan, yang sebelumnya terbagi dalam sistem pendidikan Jerman timur dan Jerman barat dengan ideologi pendidikan yang cukup berbeda dan kualitas pendidikan yang berbeda pula. Namun demikian dalam perkembangannya Jerman mampu bersaing dalam dunia Industri dan perdagangan Internasional.

Berdasarkan dari kajian pada kedua negara di atas, ternyata kedua negara memiliki sistem otoritas pendidikan yang hampir sama yaitu desentralisasi pendidikan yang menyerahkan kewenangan dan tanggung jawab pendidikan pada Lander negara bagian (jerman) atau gubernur walikota masing-masing daerah untuk Korea Selatan. Perbedaannya, jika di Jerman desentralisasi murni dengan kata lain, tidak ada tujuan pendidikan nasional yang langsung mengarahkan arah pendidikan secara nasional, karena tujuan pendidikan tergantung pada negara bagian masing-masing sesuai ideology yang di anut, yaitu sosialis dan demokrasi moderat (yang ada hanya prinsip-prinsip pendidikan nasional); sementara di Korea selatan terdapat tujuan nasional pendidikan yang perlu di acui dalam penyelenggaraan pendidikan pada setiap daerah atau wilayah (lebih mirip dengan di Indonesia).

Di Jerman pengembangan pendidikan setiap negara bagian melibatkan masyarakat setempat, di Korea Selatan pengembangan pendidikan berada pada wadah Dewan pendidikan yang diketuai oleh gubernur atau walikota dengan anggotanya sebanyak 5-6 orang, sehingga berjumlah 7 (tujuh) orang.

Dewan Pendidikan inilah yang bertanggung jawab terhadap operasional pendidikan di Korea Selatan, sehingga dewan/komite pendidikan diberikan kewenangan yang luas untuk menjabarkan berbagai macam kebijakan sesuai panduan yang telah dikeluarkan oleh kementerian pendidikan.

Kondisi ini sangat berbeda dengan Indonesia, yang hingga saat ini desentralisasi pendidikan di Indonesia, belum mampu berjalan secara lancar, segala sesuatunya masih diatur dan tergantung dari pemerintahan pusat. Kepedulian pemerintahan daerah terhadap pendidikan masih relatif rendah. Keberadaan “Dewan Pendidikan” di Korea Selatan yang berwenang mengatur perencanaan dan kebijakan pendidikan, berbeda dengan di Indonesia “Dewan Pendidikan” tidak memiliki “otoritas” dalam hal perumusan kebijakan, sifatnya hanya baru sebatas sebagai “pengkaji” masalah-masalah pendidikan, sehingga akibatnya proses desentralisasi pendidikan di Indonesia tidak berjalan dengan baik jika dibanding pada kedua negara tersebut.

Hal ini dimungkinkan memiliki hubungan yang erat dengan kondisi pembiayaan pendidikan bila ditinjau dari anggaran pendidikan Negara, dimana kedua Negara ini sudah sejak lama telah menganggarkan anggaran pendidikan yang cukup signifikan dengan hasil yang didapat yaitu masing-masing : Jerman 8,4% dan Korea Selatan 17,5, dari anggaran belanja Negara, sedangkan Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945, anggaran pendidikan bila dirata-rata baru berkutat-katit antara 2-7,8% dari total anggaran Negara, meskipun UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas telah menyebutkan anggaran pendidikan 20%.

Kondisi ini jauh berbeda dengan anggaran kedua Negara ini, jadi teori tidak dapat dipungkiri bahwa “semakin tinggi anggaran pendidikan semakin maju ekonomi di suatu Negara” (Ferggeson, 1999).

Kondisi lain yang dapat dipetik dalam hal guru, dimana kedua Negara ini untuk menjadi guru SD saja di Jerman harus berkualifikasi S1 pada tahun 1990-an begitu juga di Korea Selatan, untuk guru SD harus D-II dan untuk sekolah menengah harus diploma 4. Kondisi ini jika dibandingkan dengan Indonesia, terutama sepuluh tahunan ke belakang, guru SD kita hanya bertingkat SLTA/SPG dan baru sebagian kecil yang setingkat D-II PGSD, yang kini setelah sebagian besar telah berkualifikasi D-II PGSD baru mulai beranjak ke S1 PGSD, karena adanya tuntutan UU Guru dan Dosen tahun 2005. Jadi dari segi latar pendidikan guru SD saja kita sudah tertinggal kurang lebih 20-50 tahun dibandingkan dengan ketiga Negara ini.

Belum lagi masalah karier, dimana di ketiga Negara ini telah menerapkan sistem sertifikasi terhadap guru agak lama, sedangkan guru sekolah menengah (SLTP/SLTA) di Korea mensyaratkan harus berlatar belakang S2/S3 dengan kajian khusus atau bidang study, beda halnya di Indonesia yang terkadang satu guru bisa mengajar apa saja, bahkan tidak aneh bila guru agama mengajar matematika dll, serta sebaliknya.

Mengingat pendidikan merupakan "titik sentral" dalam maju mundurnya kondisi bangsa, untuk itu sudah selayaknyalah anggaran pendidikan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan paling penting juga menjamin kesejahteraan para guru sebagai prajurid terdepannya, sehingga para guru dapat merasa bangga dalam menjalankan tugasnya. Hal ini cukup beralasan, karena menurut Ferggosun, (1999) bahwa ".....Semakin tinggi gaji guru semakin berkualitas hasil pendidikan".

Realisasi anggaran pendidikan 20% di Indonesia merupakan salah satu kunci peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Terutama, selain untuk meningkatkan standarisasi guru juga, untuk melaksanakan standarisasi sarana-prasarana pendukung pendidikan di Indonesia. Yang akhirnya diharapkan akan mampu mendongkrak kualitas pendidikan di Indonesia. Masalah ini dimungkinkan akan dicapai, apabila semua pihak memiliki komitmen yang tinggi terhadap "industri pendidikan".

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Dari hasil telaah dan pembahasan tentang studi komparatif sistem pendidikan di Jerman dan di Korea Selatan, dapat penulis simpulkan antara lain, sebagai berikut :

- a. **Sistem manajemen** di negara Jerman bersifat desentralistik murni, sementara sistem manajemen pendidikan di Korea Selatan bersifat gabungan antara sentralistik dan desentralisasi, sifat kesentralistikan di Korea Selatan hanya terbatas kepada penyusunan panduan dan pedoman semata, sedangkan operasionalnya secara penuh di serahkan kepada komite/Dewan sekolah secara mandiri untuk mengkaji proses pendidikan secara keseluruhan. Kondisi ini sangat berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia masa lalu dan masa kini. Manajemen pendidikan di Indonesia pada 6 tahun kebelakang masih sangat sentralistik. Saat ini pun meskipun sudah di laksanakan otonomi daerah dan otonomi sekolah, kenyataannya sistem pendidikan kita masih cenderung sentralistik. Semisal (Standar kelulusan dan penentuan kelulusan siswa ditentukan oleh pusat (melalui BSNP). Otonomi daerah juga belum memberikan kepedulian daerah secara penuh, terutama berkaitan dengan penyediaan anggaran pendidikan dalam APBD.
- b. **Kurikulum**, kedua Negara ini dirangkai oleh kementerian pendidikan. Untuk Jerman dirangkai kementerian pendidikan di negara bagian masing-masing yang selanjutnya diserahkan pada badan administrasi regional, sedang untuk Korea Selatan diserahkan pada Dewan Sekolah. Di Jerman kurikulum sekolah memiliki penekanan yang berbeda pada *grade yang sama* sesuai dengan jenis pendidikan yang diambil, yang pada umumnya diorientasikan untuk bekerja atau untuk persiapan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sementara di Korea Selatan sekolah diberi keleluasaan untuk menambah kurikulum lokal sesuai minat siswa dan kondisi wilayah masing-masing, dengan pilihan kurikulum lokal yang diarahkan kepada masalah : Pertanian, perikanan, dan Teknologi,

yang mampu membawa siswa untuk memiliki kreatifitas terutama untuk kehidupannya. Untuk kasus korea selatan tentang kurikulum muatan lokal implementasinya sangat berbeda dengan Indonesia, yang rata-rata memasukkan kurikulum lokal yang “ tidak” langsung berhubungan dengan pemenuhan harkat hidup siswa, seperti kurikulum lokal hanya terbatas pada bahasa daerah/bahasa asing, seni dan lain-lain, yang tidak atas dasar keinginan siswa dan kondisi daerah setempat.

- c. **Anggaran Pendidikan.** Di ketiga Negara ini rata-rata sejak tahun 40-an, telah menganggarkan pendidikan secara konstan cukup besar yaitu rata-rata 19,7% dari total anggaran Negara. Persentase Anggaran ini cukup tinggi di atas Indonesia yang hingga saat ini hanya “berkutat” diantara rata-rata 2-8 samapi 7,8% dari total anggaran Negara. Baru pada awal tahun 2009, anggaran pendidikan akan dianggarkan 20% dari total anggaran negara.
- d. **Guru.** Mengingat guru memegang peran “sentral” dalam kelangsungan pendidikan maka kedua Negara, telah sejak lama mensyaratkan bagi guru SD adalah berpendidikan *junior college* hingga *senior college* sedangkan untuk sekolah menengah harus berlatar belakang S2/S3, dengan sistem sertifikasi, dan untuk bagi guru sekolah menengah hanya boleh mengajar sesuai bidang studi dan boleh mengajar untuk semua mata ajaran bagi guru SD. Di Indonesia berbeda, sampai saat ini sebagian guru SD masih ada yang berkualifikasi SPG/PGA dan sebagian besar baru berkualifikasi D-2; serta masih banyak guru SMP dan SMA yang berkualifikasi D3 meskipun sebagian telah berkualifikasi S1 dan S2. Begitu pula untuk dosen mahasiswa D-2 di , ketiga negara sudah sejak lama harus berkualifikasi S2/S3, sementara di Indonesia, sampai saat ini sebagian besar dosen D-2 PGSD masih berkualifikasi S1 dan sebagian kecil yang S2.

2. Rekomendasi

Atas dasar telaah, kajian dan simpulan di atas, penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perlu adanya realisasi anggaran pendidikan 20% sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Sisdiknas, no 20/2003. Hal ini penting mengingat kualitas pendidikan sangat terkait komitmen pemerintah yang diwujudkan dalam besarnya penyediaan anggaran pendidikan. Dengan anggaran pendidikan yang memadai berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyediaan sekolah gratis untuk pendidikan dasar akan sangat dimungkinkan.
- b. Untuk memberikan peluang masa depan pada siswa, kiranya sistem kurikulum hendaknya lebih fleksibel dan daerah pun agar memasukkan kurikulum lokal yang bersifat “kreatifitas” sesuai kondisi daerah masing-masing : seperti kurikulum lokal pertanian, perikanan, perkebunan.teknologi dan lain-lain, tidak hanya sebatas kurikulum seperti bahasa daerah atau bahasa asing yang selama ini banyak dimunculkan sehingga, tidak berpengaruh terhadap lapangan kerja dan tidak memberikan jaminan untuk kehidupan.pekerjaan siswa setelah tamat sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiar Syah Nur, (2001), *Perbandingan sistem pendidikan*, Bandung : Lubuk Agung.
- Nanag Fattah. (1996). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Persada Karya.
- NIER, (1999). *An International Comparative Study of School Curriculum*. Tokyo, Japan.
- Ngalim Purwanto. (1993). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Badung: CV Remaja Karya.

Supriadi, Iman (1988), *Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan*. Jakarta, P2LPTK

Undap, Andy PP (1988). *Pola Kepemimpinan dan profesionalisasi. Tenaga Kependidikan*. (Disertasi) Bandung; Program Pascasarjana UPI.

<http://www.inca.org.uk/1432.html> (diambil 5 Mei 2008)